

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.Landasan Teori

1. Pembangunan.

Pembangunan merupakan suatu proses yang meliputi banyak dimensi yakni perubahan dalam struktur sosial, sikap hidup masyarakat, perubahan kelembagaan, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan nasional, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan serta pemberantasan kemiskinan (Mukhlis, 2009).

Pembangunan dalam suatu Negara ditujukan dalam tiga hal pokok yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses kegiatan ekonomi dan sosial (Todaro, 2006).

Tujuan dari proses pembangunan yang dilakukan suatu Negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Kesejahteraan hidup masyarakat tersebut dapat dilihat dari tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan produk nasional baik GDP (*Gross Domestic Product*) maupun GNP (*Gross National Product*) karena adanya peningkatan kuantitas faktor yang digunakan dalam proses produksi tersebut (Hudiyanto, 2014).

Menurut Todaro (2006), pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan lingkungan hidup, karena pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi pada

pemenuhan kebutuhan masyarakat seringkali mengesampingkan aspek lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan pelestariannya akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang. Sebab lingkungan merupakan aspek penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pencapaian pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya bergantung pada peningkatan kegiatan ekonomi melainkan juga peningkatan aspek sosial dan lingkungan (Pahlefi, 2014).

Pembangunan berkelanjutan merupakan integrasi dari tiga aspek yaitu kelestarian lingkungan, kelestarian sosial, dan keberlangsungan ekonomi. Keberadaan sumber daya alam tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Goodland, 1995 dalam Mukhlis, 2009). Terdapat beberapa komponen penting yang harus dipenuhi dalam pembangunan berkelanjutan yaitu :

- a) Memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan ekonomi
- b) Pemerataan
- c) Distribusi terhadap pengaruh kekuatan dan ekonomi
- d) Berorientasi pada masa depan
- e) Kegiatan antisipasi harus tersedia terlebih dahulu daripada kegiatan reaksi

2. Barang Publik (*Public Goods*).

Barang publik atau *public goods* akan terjadi apabila biaya tambahan atau biaya marginal yang muncul dari adanya penambahan konsumen adalah nol, dan orang lain tidak dapat dikecualikan dalam penggunaan barang tersebut (Pindyck dan Rubinfeld, 2005 dalam Juliansah, 2010).

Barang publik didefinisikan sebagai jenis barang yang dibutuhkan masyarakat, namun tidak ada seorangpun yang bersedia menyediakannya atau mungkin dihasilkan oleh swasta namun dalam jumlah yang sangat terbatas. Dalam banyak kasus, penyediaan barang publik dilakukan oleh pemerintah, hal ini menyiratkan bahwa barang tersebut tersedia untuk semua orang, adapun biaya dalam penyediaan barang publik tersebut biasanya bersumber dari pajak (Hyman, 2011). Barang publik memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan barang lain yaitu:

1. Consumption is nonexcludable (Tidak dapat dikecualikan dalam konsumsi)

Tidak mungkin untuk mencegah orang lain dalam menggunakan barang publik tersebut, atau tidak ada pengecualian dalam menggunakan barang tersebut (Rosen, 2005).

2. Nonrival in consumption (Tidak ada persaingan dalam konsumsi)

Apabila satu orang yang mengkonsumsi suatu barang publik tersebut maka tidak akan mengurangi kegunaan barang tersebut kepada orang lain atau biaya tambahan sumberdaya (Rosen, 2005).

3. Eksternalitas.

Konsumsi terhadap barang publik sering menimbulkan eksternalitas. Eksternalitas merupakan dampak yang tidak terkompensasi dari tindakan seseorang terhadap kesejahteraan orang lain yang tidak terlibat. Menurut Sari (2015), suatu eksternalitas akan muncul jika seseorang melakukan kegiatan yang dapat memengaruhi kesejahteraan orang lain, tetapi tidak membayar atau menerima kompensasi atas adanya pengaruh tersebut. Adanya eksternalitas dalam suatu aktivitas maka akan menimbulkan inefisiensi. Inefisiensi ini akan timbul apabila tindakan seseorang memengaruhi orang lain dan tidak tercermin dalam sistem harga.

Eksternalitas merupakan sebuah keterkaitan antara suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar dimana dari kegiatan tersebut menimbulkan manfaat dan biaya bagi pihak diluar pelaksana kegiatan tersebut. Eksternalitas lingkungan dapat diartikan sebagai manfaat dan biaya yang ditunjukkan oleh perubahan fisik hayati. Misalnya polusi air yang disebabkan limbah sebuah perusahaan, polusi ini termasuk dalam eksternalitas lingkungan, dimana polusi tersebut telah merubah baik secara fisik maupun hayati sungai yang berada di sekitar perusahaan tersebut (Juliansah, 2010).

a. Bentuk Eksternalitas.

Eksternalitas ditinjau dari segi dampaknya memiliki dua macam bentuk yaitu:

1) Eksternalitas Negatif.

Eksternalitas negatif adalah dampak yang merugikan yang diterima oleh pihak lain sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Ketika terjadi eksternalitas yang negatif, harga barang atau jasa tidak menggambarkan biaya sosial tambahan (*marginal social cost*) secara sempurna pada sumber daya yang dialokasikan dalam produksi. Baik pembeli maupun penjual barang tidak memperhatikan biaya-biaya ini pada pihak ketiga (Desta, 2016). Eksternalitas negatif tersebut muncul ketika suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok menghasilkan efek atau dampak yang merugikan orang lain (Sankar, 2008).

2) Eksternalitas Positif.

Eksternalitas positif disebut juga sebagai dampak dari aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang memberikan keuntungan bagi pihak lain. Menurut Desta (2016) eksternalitas positif merupakan sebuah keuntungan terhadap pihak ketiga selain penjual atau pembeli barang atau jasa yang tidak direfleksikan dalam harga. Ketika terjadi eksternalitas positif, maka harga tidak sama dengan keuntungan sosial tambahan (*marginal social benefit*) dari barang dan jasa yang ada. Dengan kata lain, eksternalitas positif muncul apabila tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dapat memberikan manfaat kepada orang lain.

Konsep *Multiplier effect* adalah suatu konsep yang membahas mengenai suatu dampak. Konsep *multiplier* mempunyai pandangan yang berbeda-beda terutama dalam membahas dampak-dampak yang terjadi dalam pengembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi (Chotimah, 2012). Menurut Moretti (2010), *multiplier effect* dapat ditentukan oleh selera konsumen, teknologi, kemampuan pekerja, dan pendapatan yang diterima oleh masyarakat.

Efek pengganda pendapatan merupakan perkiraan potensi kenaikan pendapatan masyarakat, sebagai akibat adanya kesempatan kerja yang luas. Analisis pengganda (*multiplier analysis*) dapat dilakukan terhadap pendapatan masyarakat, pengeluaran masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja (Wildayana dkk., 2008). *Multiplier effect* di bidang ekonomi dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat dan kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat (Domanski & Gwosdz, 2010). Menurut Lestari (2015), *multiplier effect* adalah suatu konsep yang menjelaskan mengenai suatu dampak dari suatu kegiatan yang menyebabkan munculnya kegiatan yang lain.

Eksternalitas yang terkait dengan efisiensi alokasi sumber daya alam atau eksternalitas lingkungan sangat memerlukan peranan dari pemerintah dalam pengendalian eksternalitas tersebut (Sarpasen, 2013).

Berdasarkan pihak yang melakukan dan pihak yang menerima akibat, eksternalitas dapat dibedakan menjadi 4 yaitu:

1) Eksternalitas Produsen Terhadap Produsen.

Eksternalitas produsen terhadap produsen lain terjadi jika input dan output yang digunakan seorang produsen dapat mempengaruhi input dan output produsen lain, baik dalam bentuk pengaruh positif maupun negatif (Desta, 2016).

2) Eksternalitas Produsen Terhadap Konsumen.

Eksternalitas produsen terhadap konsumen terjadi ketika aktivitas produsen menimbulkan pengaruh terhadap utilitas individu tanpa mendapat suatu kompensasi apapun (Rinawati, 2011). Misalnya kasus yang terjadi pada polusi udara berupa asap dari suatu pabrik.

3) Eksternalitas Konsumen Terhadap Produsen.

Eksternalitas konsumen terhadap produsen meliputi dampak dari kegiatan yang dilakukan konsumen terhadap output dari produsen. Apabila suatu aktivitas konsumen memberikan dampak pada suatu output perusahaan, optimalisasi penggunaan sumber-sumber ekonomi akan terjadi apabila biaya marginal aktivitas konsumen sama dengan keuntungan marginal yang diterima oleh semua orang (Rinawati, 2011).

4) Eksternalitas Konsumen Terhadap Konsumen.

Eksternalitas konsumen terhadap konsumen terjadi ketika suatu aktivitas seorang konsumen mempengaruhi utilitas konsumen lain. Eksternalitas konsumen terhadap konsumen tidak memberikan pengaruh nyata terhadap perekonomian (Desta, 2016).

b. Faktor Penyebab Eksternalitas.

Eksternalitas pada dasarnya timbul karena aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya eksternalitas :

1) Keberadaan Barang Publik (*Public Goods*).

Public goods atau barang publik adalah barang-barang yang tidak (bersifat) *ekskludabled* dan tidak juga (bersifat) rival. Artinya, kita tidak dapat mencegah orang lain dalam menggunakan barang publik tersebut dan penggunaan seseorang atas barang publik tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk menggunakannya (Mankiw dkk., 2013).

Ada dua ciri utama dari barang publik yaitu yang pertama, barang publik merupakan konsumsi umum yang dicirikan oleh penawaran gabungan dan tidak terdapat persaingan dalam mengkonsumsinya. Kedua, barang publik tidak eksklusif artinya penawaran tidak hanya diperuntukkan bagi seseorang dan mengabaikan yang lainnya tetapi barang publik dapat digunakan secara umum oleh seluruh masyarakat (Desti, 2016).

2) Sumber Daya Bersama.

Sumber daya bersama terbuka bagi siapapun yang ingin menggunakannya, tetapi tidak seperti barang publik, sumber daya milik bersama memiliki sifat persaingan. Pemanfaatannya oleh seseorang akan mengurangi peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Keberadaan sumber daya milik bersama ini, pemerintah perlu mempertimbangkan seberapa banyak pemanfaatannya yang efisien (Desti, 2016).

3) Ketidakefisienan Pasar.

Masalah lingkungan bisa terjadi ketika salah satu partisipan dalam suatu tukar menukar hak kepemilikan mampu mempengaruhi hasil yang terjadi. Hal ini terjadi pada pasar tidak sempurna seperti pada pasar monopoli. Suatu pasar dapat tetap bertahan dan berfungsi secara efisien jika hak milik atas barang dan jasa yang dipertukarkan didefinisikan dengan baik dan biaya transaksi untuk pertukarannya kecil, namun untuk sumber daya lingkungan seperti udara, air di sungai, dan mata air hak milik tidak didefinisikan dengan baik. Inilah yang menimbulkan adanya masalah lingkungan atau eksternalitas lingkungan (Sankar, 2008).

4) Kegagalan Pemerintah.

Kegagalan pemerintah dapat diakibatkan karena adanya kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu sehingga mendorong terjadinya inefisiensi, kelompok-kelompok tersebut memanfaatkan pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar melalui kegiatan politik, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya (Desta, 2016).

c. Alternatif Solusi atas Eksternalitas.

Dalam mengatasi masalah eksternalitas, diperlukan penanganan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun swasta baik pribadi maupun kelompok atau perusahaan. Semua penanganan terhadap eksternalitas ini sama-sama bertujuan untuk mendekatkan alokasi sumberdaya pada penggunaan yang optimal (Mankiw dkk., 2013). Berikut ini terdapat beberapa solusi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam mengatasi persoalan eksternalitas :

1) Regulasi.

Pemerintah dapat mengatasi suatu eksternalitas dengan melarang atau mewajibkan perilaku tertentu dari pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, misalnya membuang limbah yang beracun ke sungai atau sumber air merupakan suatu kejahatan. Dalam kasus ini, biaya eksternal bagi masyarakat yang menggunakan air sungai jauh lebih besar daripada manfaat bagi pembuang limbah tersebut.

2) Pajak Pigovian dan Subsidi.

Dalam menangani suatu masalah eksternalitas pemerintah tidak dapat mengatur perilaku masyarakat, tetapi pemerintah dapat menerapkan kebijakan berbasis pasar untuk menyelaraskan insentif swasta dengan efisiensi sosial. Misalnya pemerintah dapat menginternalisasi eksternalitas atau mengatasi masalah eksternalitas dengan menarik pajak atas kegiatan yang menimbulkan eksternalitas negatif dan menyubsidi kegiatan yang memiliki eksternalitas positif. Pajak yang dikenakan untuk memperbaiki pengaruh eksternalitas negatif disebut dengan Pajak Pigovian. Pajak Pigovian tersebut dapat dijadikan kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak dari eksternalitas tersebut (Mankiw dkk., 2013).

3) Solusi Swasta.

Masalah eksternalitas juga dapat diatasi oleh pihak yang menimbulkan eksternalitas dan masyarakat yang menerima eksternalitas. Adapun caranya dengan membuat sebuah solusi swasta diantara pihak yang berkepentingan tersebut. Motif utama mereka untuk memenuhi kepentingannya sendiri, namun dalam melakukan suatu tindakan, mereka juga sekaligus mengatasi eksternalitas. Eksternalitas ini dapat dinternalisasikan dengan cara penggabungan kedua usaha

(Mankiw dkk., 2013). Cara lainnya adalah dengan penyusunan kontrak diantara pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Melalui adanya kontrak tersebut, maka kemungkinan terjadinya inefisiensi yang bersumber dari eksternalitas negatif bisa dihindari atau dikurangi dan kedua belah pihak akan sama-sama lebih untung dibanding jika keduanya menjalankan usahanya sendiri-sendiri, tanpa memperhitungkan kepentingan pihak lain (Juliansah, 2010).

4) *Teorema Coase.*

Teorema Coase merupakan solusi permasalahan eksternalitas yang dilakukan oleh pihak swasta dengan cara melakukan tawar-menawar mengenai alokasi sumber-sumber daya tanpa harus mengeluarkan biaya, sehingga mereka dapat menyelesaikan eksternalitas mereka dengan sendirinya (Mankiw dkk., 2013).

d. *Cost Of Illness Dan Replacement Cost.*

Untuk mengestimasi nilai kerugian atau eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) dapat dihitung dengan dua metode yaitu metode *cost of illness* (biaya kesehatan) dan *replacement cost* (biaya pengganti). Dua metode ini dapat mengestimasi kerugian yang diderita masyarakat berupa biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat baik untuk mengganti kebutuhan mereka dengan bahan alternatif ataupun biaya untuk pengobatan dari penyakit yang disebabkan karena adanya sampah (Bujagunasti, 2009).

a) *Cost Of Illness* (Biaya Kesehatan).

Cost of illness merupakan salah satu metode dalam evaluasi ekonomi. Menurut Dixon (1996) dalam Pahlefi (2014), pendekatan *cost of illness* dapat digunakan untuk mengukur nilai kerugian kesehatan karena pencemaran, hal ini didasarkan pada keterkaitan fungsi kerusakan yang berhubungan dengan tingkat pencemaran dan pengaruhnya terhadap kesehatan fisik.

Cost of illness (biaya kesehatan) dibedakan menjadi dua yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung dibagi menjadi *medical cost* dan *non-medical cost*. Yang termasuk dalam *medical cost* yaitu biaya perawatan medis pasien, sedangkan *non-medical cost* yaitu biaya perjalanan pasien untuk menempuh perjalanan sampai ke tempat pengobatan, biaya logistik dan akomodasi yang besarnya bervariasi. Biaya tidak langsung berkaitan dengan hilangnya sumberdaya karena penyakit tersebut, misalnya *opportunity cost* akibat hilangnya pendapatan (Bujagunasti, 2009).

Pendekatan *cost of illness* dapat digunakan untuk mengukur nilai dari kerugian kesehatan akibat adanya pencemaran, pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan fungsi kerusakan yang berhubungan dengan tingkat pencemaran dan pengaruhnya terhadap kesehatan fisik (Gita, 2010 dalam Hifdziyah, 2011).

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2012, Pendekatan Biaya Pengobatan (*Cost Of Illness*) digunakan untuk memberikan harga modal manusia yang terkena dampak akibat perubahan kualitas SDALH. Dampak dari perubahan kualitas lingkungan tersebut dapat menimbulkan

pengaruh negatif bagi kesehatan yaitu menyebabkan sekelompok masyarakat menjadi sakit. Adapun tahapan pelaksanaannya :

- a. Mengetahui bahwa telah terjadi gangguan kesehatan yang mengakibatkan perlu adanya biaya pengobatan dan atau kerugian akibat penurunan produktifitas kerja.
 - b. Mengetahui biaya pengobatan yang dibutuhkan sampai sembuh.
 - c. Mengetahui kerugian akibat penurunan produktifitas kerja, misalkan dengan pendekatan upah yang dihasilkan.
 - d. Menghitung total biaya pengobatan dan penurunan produktifitas kerja.
- b) *Replacement Cost* (Biaya Pengganti).

Replacement cost adalah teknik yang mengidentifikasi biaya pengeluaran untuk perbaikan lingkungan hingga mencapai bahkan mendekati keadaan semula, atau biaya yang dihitung untuk menggantikan sumber daya yang rusak atau menurun akibat aktivitas manusia (Dhewanti et al, 2007).

Replacement cost (biaya pengganti) adalah biaya yang dikeluarkan untuk menggantikan sumberdaya yang telah rusak. Misalnya biaya yang dikeluarkan untuk membeli air guna mengganti sumber air yang tercemar akibat adanya TPA sampah, maka biaya tersebut termasuk biaya pengganti yang bisa digunakan untuk mengestimasi besarnya nilai kerugian atau eksternalitas negatif yang ditimbulkan karena adanya TPA sampah (Pahlefi, 2014).

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2012, teknik biaya pengganti (*Replacement Cost*) ini secara umum mengidentifikasi biaya pengeluaran untuk perbaikan lingkungan hingga

mendekati pada keadaan semula. Biaya yang dikeluarkan untuk mengganti SDA yang rusak dan kualitas lingkungan yang menurun sebagai akibat dari pengelolaan SDA yang kurang sesuai dapat menjadi dasar dalam penaksiran manfaat yang kurang diperkirakan dari suatu perubahan. Tahapan dalam melakukan teknik *replacement cost* adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi fungsi SDA yang hilang karena perubahan kualitas lingkungan.
- b. Menentukan pengganti fungsi SDA yang hilang atau terganggu tersebut.
- c. Menyiapkan data fisik termasuk harga pasar untuk masing-masing komponen yang dibutuhkan sehubungan dengan fungsi dari pengganti tersebut.
- d. Menghitung jumlah nilai moneter untuk menciptakan semua fungsi dan manfaat yang diganti.

4. Rantai Nilai dan Nilai Tambah.

Rantai nilai merupakan suatu cara untuk memandang suatu bisnis sebagai sebuah rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Rantai nilai mencakup margin laba karena *markup* diatas biaya perusahaan untuk menyediakan aktivitas bernilai tambah umumnya merupakan bagian dari harga yang dibayarkan oleh pembeli (Apriliyanti, 2014).

Konsep nilai tambah merupakan salah satu pengembangan nilai yang terjadi karena adanya perlakuan input pada suatu komoditas. Input yang menyebabkan terjadinya nilai tambah dapat dilihat dari adanya perubahan pada komoditas tersebut, seperti perubahan bentuk, tempat dan waktu. Nilai tambah merupakan pertambahan nilai yang terjadi karena suatu komoditas mengalami

proses pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan dalam suatu proses produksi. Dari definisi tersebut nilai tambah adalah selisih lebih antara nilai produk dengan nilai biaya input, tidak termasuk upah tenaga kerja (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012). Besarnya nilai tambah tersebut dipengaruhi oleh faktor teknis dan non teknis. Informasi yang diperoleh dari analisis nilai tambah adalah besarnya nilai tambah, rasio nilai tambah, margin dan balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi (Wibowo, 2014).

Nilai tambah adalah nilai output dikurangi dengan perbedaan nilai output perusahaan dan nilai seluruh input yang dibeli diluar perusahaan. Besarnya nilai tambah tergantung dari teknologi yang digunakan dalam proses produksi dan adanya perlakuan lebih lanjut terhadap produk yang dihasilkan (Gittinger, 1986 dalam Nur, 2013). Penggunaan teknologi yang baik akan menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik pula, sehingga harga produk akan lebih tinggi dan akan memperbesar nilai tambah yang diperoleh (Suryana, 1990 dalam Nur, 2013).

5. Pengertian Sampah.

Sampah adalah sisa dari bahan yang telah digunakan baik dari sisa kegiatan konsumsi maupun produksi, atau suatu benda yang sudah tidak memiliki manfaat lagi. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Secara umum sampah dibedakan dapat menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan jenis sampah yang mudah terurai seperti sampah daun, sisa sayuran, nasi basi, berbagai jenis kertas, tinja dan urin. Sementara sampah anorganik merupakan sampah yang sulit

terurai oleh tanah atau lambat lapuk, misalnya plastik, kaca, mika, logam, dan sebagainya.

Sampah dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari sampah yakni sampah dapat di daur ulang menjadi barang yang lebih berguna. Sampah organik bisa diolah menjadi pupuk kompos sebagai penyubur tanah, sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali setelah di daur ulang, gas-gas yang dihasilkan sampah mempunyai nilai ekonomi karena dapat dikonversi menjadi tenaga listrik serta proses pengelolaan sampah dapat membuka lapangan kerja. Dampak negatif dari sampah antara lain menimbulkan pencemaran lingkungan dan dapat menjadi sumber penyakit (Ramadhan, 2009).

6. Tempat Pembuangan Akhir Sampah.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menangani masalah lingkungan yang diakibatkan oleh sampah (Suhan, 2009). Berdasarkan pada Pasal 4 Bab II UU NO. 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah adalah fasilitas fisik yang digunakan untuk pembuangan sampah. TPA Sampah merupakan salah satu barang publik yang disediakan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah. Barang publik ini termasuk dalam barang publik campuran atau yang biasa disebut *common property resource*. Penyediaan TPA Sampah membutuhkan

biaya investasi yang sangat besar sehingga skala ekonomi yang efisien baru tercapai pada tingkat produksi yang besar. Hal ini menyebabkan terjadinya monopoli alamiah karena pemerintah merupakan satu-satunya pengelola TPA Sampah (Hifdziyah, 2011).

Dalam melakukan pengelolaan sampah di TPA, ada beberapa metode yang sering digunakan yaitu :

1. *Open Dumping.*

Metode ini adalah metode pembuangan akhir yang sangat sederhana karena sampahnya hanya ditumpuk di lokasi tertentu tanpa perlakuan khusus (Yudianto, 2007 dalam Hifdziyah, 2011). Sehingga dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan sekitarnya. Metode *open dumping* sudah dilarang untuk diterapkan dalam sistem pembuangan TPA Sampah, sebagian besar Negara juga menerapkan peraturan larangan *open dumping* ini.

2. *Controlled Landfill.*

Metode ini merupakan gabungan antara teknik *open dumping* dan *sanitary landfill*. Pada metode ini sampah ditimbun dan diratakan. Pipa-pipa ditanam pada dasar lahan untuk mengalirkan air lindi dan ditanam secara vertikal untuk mengeluarkan metan ke udara. Setelah timbunan sampah penuh dilakukan penutupan terhadap hamparan sampah tersebut dengan tanah dan dipadatkan (Hifdziyah, 2011).

3. *Sanitary Landfill.*

Teknik *sanitary landfill* merupakan cara penimbunan sampah padat pada suatu hamparan lahan dengan memperhatikan keamanan lingkungan karena telah

ada perlakuan terhadap sampah padat tersebut. Pada teknik ini, sampah dipadatkan, kemudian dilapisi tanah dan dipadatkan kembali, begitu seterusnya selang seling antara sampah dan tanah. Kegiatan penimbunan sampah dengan tanah akan lebih baik bila dilakukan dalam intensitas yang sering agar dampak negatif dari sampah dapat sedikit teratasi (Hifdziyah, 2011).

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (UU No. 18 Tahun 2008). Menurut Permana (2010) konsep TPST ini bertitik tolak pada aktifitas pengelolaan sampah untuk tujuan pemanfaatan kembali guna mengurangi sampah, yang didalamnya terdapat fasilitas untuk merubah sampah menjadi bentuk yang lebih berguna, seperti mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Dengan adanya aktivitas mendaur ulang sampah ini diharapkan dapat memperpanjang umur layan dari TPA sampah tersebut.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fathurrozi (2016) yang berjudul Eksternalitas Industri di Kota Probolinggo, bertujuan untuk mengetahui eksternalitas positif dan negatif industri di Kota Probolinggo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan industri di Kota Probolinggo memiliki eksternalitas positif berupa peningkatan kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan mengurangi jumlah pengangguran. Namun disisi lain keberadaan industri tersebut juga memberikan eksternalitas negatif berupa pencemaran lingkungan yakni polusi udara dan polusi air sungai dari

limbah industri yang mengganggu aktivitas masyarakat dan menyebabkan penurunan kualitas kesehatan masyarakat sekitarnya. Persamaan penelitian Fathurrozi dengan penelitian ini adalah sama-sama bertujuan untuk mengetahui eksternalitas positif dan negatif, dan perbedaannya yaitu pada objek penelitian, dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui eksternalitas dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta metode yang digunakan yakni menggunakan metode statistik deskriptif, *replacement cost*, *cost of illness* dan nilai tambah.

Mardiko (2014) melakukan penelitian tentang Dampak Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Cikundul Terhadap Kondisi Lingkungan Sekitar Di Kota Sukabumi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa TPA Sampah Cikundul berdampak pada lingkungan fisik sekitar diantaranya kualitas air sungai tercemar, penurunan kualitas udara, jalan menjadi rusak, dan banyak masyarakat sekitar TPA yang terserang penyakit. Namun, disisi lain TPA sampah Cikundul menjadi sumber pendapatan dari sebagian masyarakat. Persamaan penelitian Mardiko dengan penelitian ini adalah tujuannya yakni untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari TPA Sampah, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dan metode yang digunakan. Penelitian Mardiko menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sementara penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif, nilai tambah, *cost of illness* dan *replacement cost*.

Putra (2016) melakukan penelitian mengenai Dampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Batulayang Bagi Masyarakat Sekitar Di Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Hasil dari

penelitian ini yaitu terdapat dampak positif dan negatif dari TPA Batulayang bagi masyarakat sekitar. Dampak positifnya yaitu memberikan pekerjaan bagi masyarakat sekitar TPA Batulayang. Sedangkan dampak negatifnya dari aspek sosial masyarakat sekitar TPA Batulayang tidak dapat memperbaiki hidupnya dan tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang lebih luas. Dan juga berdampak negatif bagi lingkungan dimana terjadi pencemaran air dan udara yang menimbulkan bibit penyakit di daerah tersebut. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai dampak yang ditimbulkan dari TPA Sampah. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode yang digunakan, metode penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif, analisis pendapatan, nilai tambah, metode *cost of illness* dan *replacement cost* untuk mengetahui besarnya dampak negatif dari TPA Sampah.

Pahlefi (2014) melakukan penelitian tentang Estimasi Nilai Eksternalitas dari Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Studi Kasus TPA Rawa Kucing Kota Tangerang), hasil dari penelitian ini yaitu eksternalitas positif dari keberadaan TPA antar lain sumber mata pencaharian bagi masyarakat, sedangkan eksternalitas negatifnya berupa pencemaran yang menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk pengganti air bersih, obat anti serangga, pembelian pengharum ruangan, dan biaya berobat. Dalam penelitian ini juga diestimasi besarnya nilai eksternalitas positif dan negatif dari keberadaan TPA sampah. Adapun hasil estimasi nilai eksternalitas positif yang diterima masyarakat sebesar Rp711. 824.000,00 per tahun yang merupakan hasil penjumlahan pendapatan dari

kegiatan mengumpulkan barang bekas, biogas dan kompos. Sedangkan total nilai eksternalitas negatif sebesar Rp 77.877.200 per tahun, nilai eksternalitas negatif dihitung menggunakan metode *replacement cost* dan *cost of illness*. Sehingga dapat dilihat bahwa dampak positif dari TPA sampah lebih besar daripada dampak negatif yang ditimbulkannya, namun tetap saja penanganan sampah yang baik sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama bertujuan untuk mengetahui eksternalitas yang ditimbulkan dari TPA Sampah. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode yang digunakan, yaitu menggunakan metode statistik deskriptif dan nilai tambah.

Budiatun (2008) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Dampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Di Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosial yang dirasakan masyarakat sekitar lokasi TPA Piyungan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan teknik analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dari aspek demografi, pembangunan TPA Piyungan berpengaruh terhadap sebagian besar demografi masyarakat yang ditunjukkan dengan tingginya mobilitas yang masuk ke Dusun Ngablak, ledakan penduduk temporal yang terkonsentrasi di Dusun Ngablak, pergeseran mata pencaharian, serta meningkatnya jumlah anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang disebabkan karena tergiur oleh mudahnya mencari uang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Budiatun, terletak pada metode yang digunakan serta tujuan penelitian. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui eksternalitas dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, metode yang digunakan statistik deskriptif, nilai tambah, *cost of illness* dan *replacement cost*.

Polzer (2015) melakukan penelitian yang berjudul *Environmental and Economical Assessment of MSW Management in Europe : An Analysis between the Landfill and WTE Impact*, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa TPA sampah merupakan metode dalam mengatasi permasalahan sampah yang paling banyak di terapkan oleh berbagai Negara, namun disisi lain metode ini memiliki dampak negatif yang besar bagi lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negatif dari sampah, diperlukan sebuah inovasi yakni mengubah sampah menjadi energy atau *Waste To Energy* (WTE). Dengan mengubah sampah menjadi energi maka akan mengurangi dampak terhadap lingkungan dan menjadikan sampah memiliki nilai ekonomi yang lebih kompetitif. Sehingga dalam MSW (*Management Solid Waste*) yang meliputi *avoid, reuse, recycle, energy recovery* dan TPA merupakan kombinasi metode yang paling memadai untuk diterapkan dalam mengatasi permasalahan limbah di Eropa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Polzer, sama-sama bertujuan untuk mengetahui dampak dari tempat pembuangan akhir sampah, dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif, nilai tambah, *replacement cost* dan *cost of illness*.

Hakami (2016) malakukan penelitian mengenai *Environmental Externalities From Landfill Disposal and Incineration of Waste*, hasil dai penelitian ini menunjukkan bahwa eksternalitas lingkungan dari pembakaran

sampah dan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah memiliki dampak yang besar bagi sektor sosial, ekonomi, lingkungan dan kebijakan pemerintah. TPA Sampah dan pembakaran sampah di satu sisi bertujuan untuk mengatasi masalah sampah dan menjaga kebersihan lingkungan, namun disisi lain kedua metode tersebut memberikan efek negatif bagi lingkungan. Pembuangan limbah atau sampah ke TPA harus dikurangi dengan cara melakukan daur ulang sampah. Dalam pembuatan kebijakan pembangunan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan tidak boleh diabaikan, penanganan limbah secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan di masa depan juga harus diperhatikan. Persamaan penelitian Hakami dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksternalitas dari tempat pembuangan akhir sampah. Perbedaannya adalah pada lokasi penelitian dan metode yang digunakan, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode statistik deskriptif, nilai tambah, *cost of illness*, dan *replacement cost*.

TABEL 2.1.

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Metodologi	Hasil
1	Mardiko (2014)	Dampak Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Cikundul Terhadap Kondisi Lingkungan Sekitar Di Kota Sukabumi	Deskriptif Kualitatif	Keberadaan TPA Sampah Cikundul menyebabkan pencemaran lingkungan dan sumber air, serta menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitarnya, namun keberadaan TPA sampah juga mampu menciptakan kesempatan kerja yang luas. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam menangani pengelolaan sampah di TPA Sampah Cikundul.

Lanjutan Tabel 2.1.

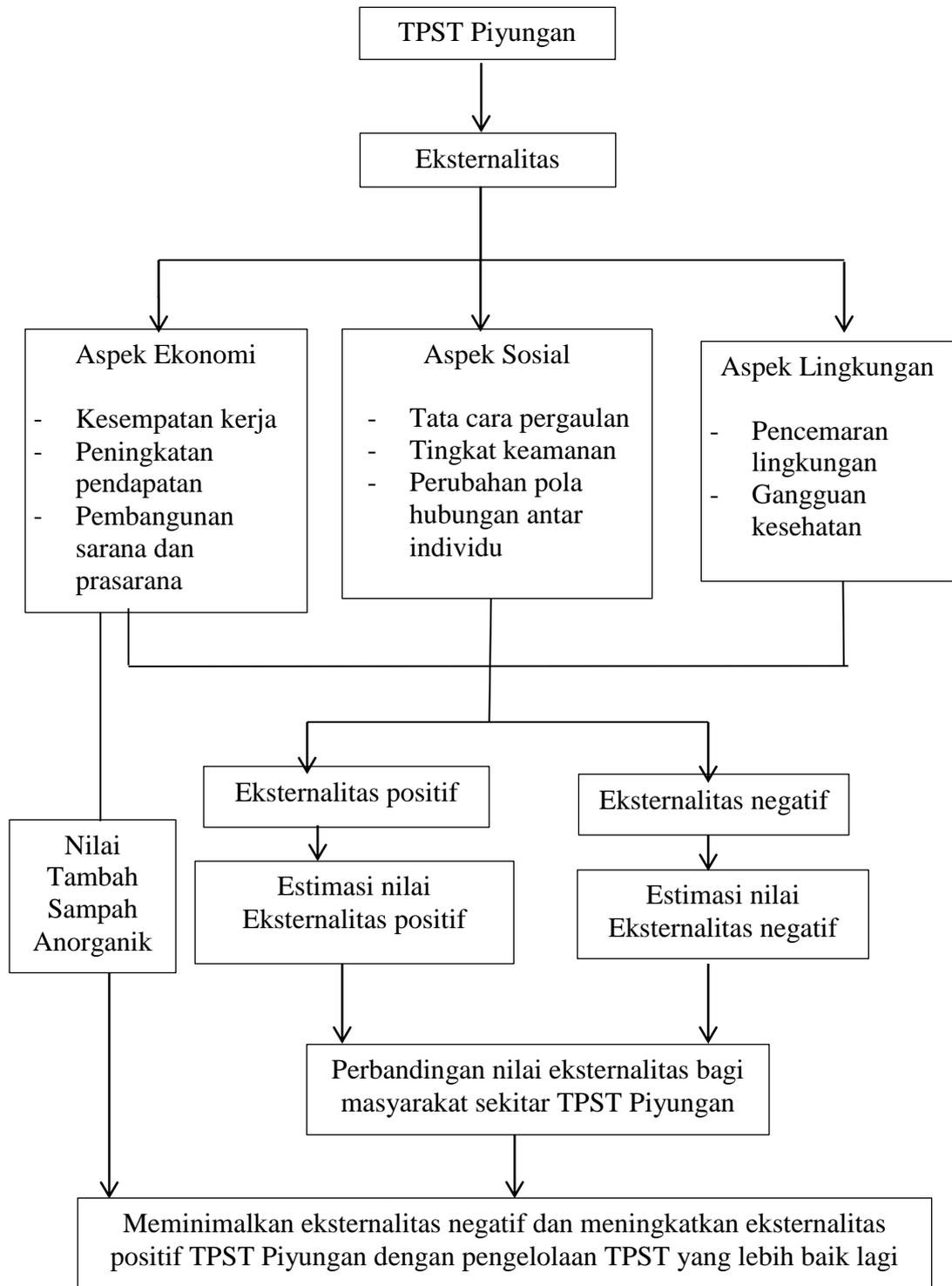
2	Putra (2016)	Dampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Batulayang Bagi Masyarakat Sekitar Di Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak	Deskriptif Kualitatif dengan teori Struktural Fungsional dengan sebutan AGIL	Keberadaan TPA Sampah Batulayang membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat sekitarnya, dampak positifnya mampu menyediakan lapangan pekerjaan namun juga memberikan dampak negatif berupa pencemaran air dan udara, gangguan kesehatan, dan juga masyarakat tidak mampu memperbaiki hidupnya dan tidak dapat bersaing dengan masyarakat luas.
3	Pahlefi (2014)	Estimasi Nilai Eksternalitas dari Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Studi Kasus TPA Rawa Kucing Kota Tangerang)	Analisis deskriptif, analisis pendapatan, <i>cost of illness</i> dan <i>replacement cost</i> .	Eksternalitas dari sebuah TPA sampah sangat besar dimana dengan keberadaan TPA sampah ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga menghasilkan biogas yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga meningkatkan pengeluaran masyarakat untuk biaya pengganti air bersih yang sudah tercemar dan biaya untuk mengurangi dampak negatif lain yang ditimbulkan dari sampah.
4.	Budiatun (2008)	Analisis Dampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Di Kabupaten Bantul	Deskriptif analisis, dengan teknik analisis kualitatif	Pembangunan TPA Piyungan memberikan dampak terhadap kondisi demografi disekitar TPA, berupa ledakan penduduk dan mobilitas penduduk yang tinggi, serta terjadi pergeseran mata pencaharian masyarakat.
5.	Fathurrozi (2016)	Eksternalitas Industri di Kota Probolinggo	Deskriptif kualitatif	Industri berdampak pada peningkatan kesempatan kerja sehingga menurunkan tingkat pengangguran, menaikkan konsumsi dan tabungan bagi masyarakat. Selain itu juga menimbulkan

Lanjutan Tabel 2.1.

				polusi yang mengganggu aktivitas masyarakat dan menurunkan tingkat kesehatan, mencemari sungai dan udara.
6.	Polzer (2015)	<i>Environmental and Economical Assessment of MSW Management in Europe : An Analysis between the Landfill and WTE Impact</i>	<i>Life Cycle Assessment (LCA)</i>	Membuang sampah ke TPA sampah akan menimbulkan dampak bagi lingkungan. Sementara jika mengubah sampah menjadi energy (<i>Waste To Energy (WTE)</i>) akan meningkatkan nilai ekonomi sampah. Sehingga WTE lebih baik untuk diterapkan dari pada hanya membuang sampah di TPA begitu saja. Selain itu daur ulang sampah juga diperlukan untuk mengurangi jumlah sampah.
7.	Hakami (2016)	<i>Environmental Externalities From Landfill Disposal And Incineration Of Waste</i>	Deskriptif Kualitatif	Eksternalitas lingkungan dari pembakaran sampah dan TPA sampah memiliki pengaruh yang besar bagi sektor ekonomi, sosial, dan kebijakan pembangunan. Diperlukan sebuah kebijakan pembangunan yang memperhatikan penanganan sampah secara berkelanjutan.

C. Kerangka Pemikiran

TPST Piyungan dapat berpengaruh positif terhadap masyarakat sekitar karena dengan adanya TPST Piyungan masyarakat dapat menambah pendapatan dengan menjadi pemulung sampah, pengepul sampah, peternak dan lain-lain. Selain menimbulkan dampak positif keberadaan TPST Piyungan juga memberikan dampak negatif, baik bagi aspek lingkungan fisik, sosial maupun ekonomi.



(Sumber : Pahlefi, 2014 dengan modifikasi)

GAMBAR 2.1.
Kerangka Pemikiran